

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Gerakan yang dilakukan oleh FPPB ini tak terlepas dari perubahan relasi negara, pasar dan masyarakat di era transisi demokrasi. Perubahan relasi yang merujuk pada menguatnya supremasi masyarakat atas negara tersebut direspon secara cepat oleh FPPB untuk mentrasformasikan strategi gerakan dari bawah tanah menjadi gerakan politik formal. Proses transformasi gerakan yang dilakukan FPPB ini didukung pula dengan adanya faktor internal FPPB, yaitu kesadaran para aktor gerakan untuk mereformulasi strategi gerakan dari metode konvensional seperti aksi *reclaiming*, perlawanan dan aksi demonstrasi, yang kemudian merubahnya dengan metode penguasaan jalur-jalur politik formal dan pemerintahan. Strategi gerakan politik ini kemudian diterjemahkan dengan upaya merebut jabatan-jabatan politik, dimulai dari kepala desa hingga kepala daerah/ bupati, dan lembaga legislatif DPRD. Strategi gerakan FPPB mengalami beberapa fase gerakan, dari gerakan bawah tanah semasa Orde Baru, kemudian gerakan *reclaiming* pada periode pasca reformasi, dan sekarang FPPB yang telah bertransformasi menjadi Omah Tani tidak hanya sebatas organisasi kolektif saja, melainkan menjadi mesin politik yang siap mengantarkan kader-kader petaninya menduduki posisi formal politik pemerintahan. Semua itu tetap pada jalur misi organisasi, yaitu guna memperjuangkan kepentingan petani anggota FPPB, “menyelesaikan kasus sengketa tanah”. Secara singkat gerakan FPPB dapat ditandai dengan tiga instrumen

karakter gerakan dalam memperoleh tanah, yaitu; strategi *reclaiming* (pendudukan tanah secara sepihak), *demonstrasi* (gerakan mobilisasi massa secara besar-besaran), dan *audiensi* (dengar pendapat dengan pemerintah). Ketika upaya legal dan persuasif seringkali menemui jalan buntu dalam gerakan petani, cenderung pola gerakan petani ini menjadi metode radikalisme dengan instrumen kekerasan sebagai strategi akhir gerakan. Namun berbeda dengan FPPB yang memilih jalur politik elektoral sebagai strategi gerakan. Sasaran dari gerakan politik ini diarahkan untuk merebut pos-pos kepemimpinan dan kekuasaan lokal untuk merubah kebijakan yang lebih *pro* terhadap kepentingan petani. Pengaplikasian strategi ini sendiri didukung oleh kapasitas organisasi yang cukup kuat untuk memobilisir potensi massa yang berjumlah besar. Dimana potensi massa ini kemudian dikonversikan dalam bentuk suara dalam pemilihan umum. Realisasi ini kemudian dimaksudkan untuk merubah skema kebijakan pemerintah yang berpihak pada penyelesaian kasus sengketa tanah petani.

Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat gerakan FPPB dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama berasal dari kalangan internal, sebagai faktor pendukung diwakili oleh ide-ide dan sumberdaya anggota dan pengurus organisasi. Sebagai faktor penghambat yang berasal dari internal diketahui dengan adanya penghianatan dan kurangnya sumberdaya yang memadai dari anggota organisasi. Bagian yang kedua dari faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari kalangan eksternal atau diluar organisasi. Sebagai faktor pendukung yang berasal dari eksternal organisasi diketahui dengan adanya aktor-aktor yang membantu proses perjuangan organisasi baik itu dari

meningkatkan sumberdaya anggota, perjuangan di lapangan hingga perjuangan di pengadilan selain itu juga juga didukung oleh situasi sosial dan politik yang berkembang. Sementara pada posisi penghambat gerakan yang berasal dari luar organisasi diketahui dengan adanya konflik-konflik yang terjadi mulai dari adanya tekanan pada anggota organisasi oleh sekelompok preman hingga konflik-konflik SARA yang sengaja dibuat untuk menyerang anggota organisasi dan secara khusus kepada Handoko Wibowo yang dianggap memiliki peran dominan dalam mengajak maupun mengajari para petani untuk berjuang menuntut hak-hak atas tanah yang terlantar maupun ditelantarkan oleh negara maupun perusahaan tertentu.

## 7.2 Saran

PILKADES, PILKADA, serta Pemilu Legislatif telah menjadi *front-front* perjuangan baru bagi gerakan petani. Selain sebagai strategi gerakan juga menjadi instrumen pembelajaran dalam berpolitik. Tidak saja petani terwakili secara kekuasaan formal, namun kepentingan petani juga terwakili dalam produk kebijakan yang nantinya dikeluarkan pemerintah. Akhirnya kekuasaan tidak lagi mutlak dimaknai sebagai sebuah kekuasaan, namun belajar dari pengalaman FPPB nyatanya kekuasaan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah bentuk alat perjuangan guna mencapai tujuan gerakan. Bukan menjadi sebuah hal yang mustahil, upaya-upaya gerakan FPPB tersebut dapat diadopsi oleh berbagai gerakan rakyat dibanyak sektor. Mulai dari buruh, nelayan, kaum miskin kota serta kaum yang tertindas lainnya, mereka semua sebenarnya memiliki potensi kekuatan politik yang luar biasa besarnya. Karena kesemuanya memiliki perasaan yang sama yaitu perasaan

yang merindukan akan sebuah keberpihakan yang nyata dari negara. Dengan melihat pengalaman FPPB bisa menjadi *prototipe* demokrasi di akar rumput yang juga seharusnya mampu membuka kacamata keberadaan potensi besar yang dapat dijadikan sebagai rujukan strategi baru dalam gerakan. Sementara dari pihak pemerintah semestinya minimal memberikan dukungan secara langsung terhadap upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh FPPB dalam perjuangan mereka mendayagunakan lahan-lahan terlantar. Hal ini dikarenakan akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi, sosial dan politik masyarakat dibawah pemerintahan daerah dengan masyarakat mendapatkan nilai ekonomis dari lahan yang telah didayagunakan, memperbaiki keadaan sosial dengan mendapat pelajaran politik dari adanya sebuah organisasi yang bersifat formal.

